



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2020

KEMENDAG. Urusan Pemerintahan. Bidang
Perdagangan. Gubernur. Wakil Pemerintah Pusat.
Penyelenggaraan Dekonsentrasi. TA 2021
Pelimpahan Sebagian.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia[spasi]Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 11. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 477);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1190);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negarayang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan

untuk melaksanakannya.

7. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
8. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB II

LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
- b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.

Pasal 4

- (1) Pemerintah mengalokasikan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Alokasi anggaran urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dilakukan revisi oleh PD Provinsi.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 6

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 7

- (1) Gubernur menetapkan PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) PD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh PD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (6) Gubernur dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
 - a. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;

- b. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- c. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
- d. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
- e. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional;
- f. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi; dan
- g. inspektur jenderal.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. sekretaris jenderal;
 - b. direktur jenderal perdagangan dalam negeri;
 - c. direktur jenderal perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - d. direktur jenderal perdagangan luar negeri;
 - e. direktur jenderal perundingan perdagangan internasional;
 - f. direktur jenderal pengembangan ekspor nasional; dan

- g. kepala badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB V

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 10

- (1) Menteri dapat menarik kembali pelimpahan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Penarikan kembali pelimpahan urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) PD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), PD Provinsi dikenai sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2020

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 88 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
 PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1.	GUBERNUR ACEH	ACEH	1,666,742,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,179,966,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	298,230,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	98,262,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	307,000,000
5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	147,274,000		
6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	30,440,000		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	238,760,000 486,776,000
1		OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	100,984,000
2		LAYANAN PERKANTORAN	215,740,000
3		FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	170,052,000
2.	GOVERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1,918,185,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,200,030,000
1		FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
2		FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	301,620,000
3		FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	94,909,000
4		PENGUNA PASAR LE LANG DI DAERAH	295,000,000
5		LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	145,170,000
6		STANDAR DISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,576,000
7		PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	274,755,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	718,155,000 59,730,000 229,256,000 366,464,000 62,705,000
3.	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,394,742,000 867,684,000 60,000,000 198,840,000 89,242,000 118,000,000 136,462,000 32,171,000 232,969,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	527,058,000 72,051,000 208,591,000 169,498,000 76,918,000
4.	GUBERNUR RIAU	RIAU PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,911,394,000 1,093,180,000 60,000,000 272,790,000 88,712,000 259,000,000 135,182,000 31,520,000 245,976,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	818,214,000 66,838,000 212,110,000 461,270,000 77,996,000
5.	GUBERNUR JAMBI	JAMBI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,837,184,000 1,181,137,000 60,000,000 220,890,000 85,866,000 409,500,000 130,682,000 22,504,000 251,695,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 3 LAYANAN PERKANTORAN 4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	656,047,000 72,994,000 82,049,000 199,600,000 301,404,000
6.	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,532,644,000 808,418,000 60,000,000 258,540,000 83,919,000 128,382,000 28,194,000 249,383,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 3 LAYANAN PERKANTORAN 4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	724,226,000 66,826,000 87,229,000 216,758,000 272,290,000 81,123,000
7.	GOVERNUR BENGKULU	BENGKULU PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,328,857,000 718,577,000 60,000,000 176,790,000 86,004,000 131,532,000 30,672,000 233,579,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	610,280,000 80,208,000 202,196,000 327,876,000
8.	GOVERNUR LAMPUNG	LAMPUNG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,967,211,000 1,120,275,000 60,000,000 220,890,000 80,337,000 357,000,000 122,312,000 26,624,000 253,112,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 3 LAYANAN PERKANTORAN 4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	846,936,000 82,125,000 80,698,000 177,449,000 433,357,000 73,307,000
9.	GOVERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,258,420,000 704,629,000 60,000,000 168,990,000 82,906,000 126,332,000 27,180,000 239,221,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	553,791,000 73,018,000 178,254,000 217,894,000 84,625,000
10.	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,515,312,000 713,701,000 60,000,000 191,040,000 88,055,000 134,762,000 5,004,000 234,840,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 3 LAYANAN PERKANTORAN 4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	801,611,000 90,503,000 142,053,000 185,492,000 247,716,000 135,847,000
11.	GOVERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	886,489,000 507,426,000 60,000,000 105,000,000 68,356,000 90,556,000 1,330,000 182,184,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	379,063,000 82,760,000 212,377,000 83,926,000
12.	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,318,705,000 869,118,000 60,000,000 265,155,000 71,236,000 100,000,000 100,822,000 42,838,000 229,067,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	449,587,000 69,047,000 167,911,000 143,807,000 68,822,000
13.	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	2,258,694,000 1,029,069,000 60,000,000 260,750,000 83,627,000 216,500,000 126,462,000 50,709,000 231,021,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 3 LAYANAN PERKANTORAN 4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 5 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	1,229,625,000 75,007,000 79,897,000 185,937,000 541,666,000 347,118,000
14.	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,250,440,000 751,201,000 60,000,000 206,640,000 83,804,000 128,182,000 4,346,000 268,229,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	499,239,000 83,914,000 189,565,000 153,074,000 72,686,000
15.	GOVERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,432,950,000 952,380,000 60,000,000 285,000,000 87,560,000 133,762,000 63,838,000 322,220,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	480,570,000 93,759,000 220,863,000 165,948,000
16.	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1,454,502,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	956,068,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	213,090,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	67,204,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	273,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	102,758,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	13,220,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	226,796,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	498,434,000 102,108,000 174,918,000 149,170,000 72,238,000
17.	GUBERNUR BALI	BALI PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,899,925,000 1,204,106,000 60,000,000 250,740,000 90,036,000 393,000,000 140,478,000 25,808,000 244,044,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	695,819,000 93,389,000 217,510,000 302,906,000 82,014,000
18.	GOVERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH 5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	1,969,560,000 1,201,067,000 60,000,000 198,840,000 90,866,000 439,500,000 140,062,000 5,534,000 266,265,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	768,493,000 111,627,000 222,222,000 434,644,000
19.	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	1,699,847,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	894,965,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	301,977,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	100,969,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	156,112,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	7,139,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	268,768,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	804,882,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	80,883,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	229,782,000 305,097,000 189,120,000
20.	GOVERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1,742,715,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	864,984,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	296,025,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	86,102,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	133,652,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	30,776,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	258,429,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	877,731,000
		1 LAYANAN PERKANTORAN	204,146,000
		2 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	284,576,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI /KEGIATAN/ OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN 4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	311,416,000 77,593,000
21.	GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	1,359,259,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	753,766,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	168,990,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,755,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	135,202,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	31,530,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	270,289,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	605,493,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	70,151,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	194,657,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	340,685,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
22.	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	1,513,315,000 791,853,000 60,000,000 220,890,000 88,781,000 136,092,000 31,975,000 254,115,000 721,462,000 95,283,000 210,129,000 416,050,000
23.	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,432,326,000 858,812,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	60,000,000 220,890,000 95,879,000 150,112,000 40,000,000 291,931,000 573,514,000 96,478,000 193,700,000 283,336,000
24.	GOVERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	1,360,610,000 782,448,000 60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
25.	GUBERNUR SULAWESI UTARA	2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	169,190,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,836,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	176,182,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	6,608,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	282,632,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	578,162,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	86,622,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	220,974,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	189,585,000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	80,981,000
	SULAWESI UTARA	1,864,186,000	
	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,271,555,000	
	1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
26.	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	168,990,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	100,162,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	486,000,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	156,922,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	33,000,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	266,481,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	592,631,000
1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	92,865,000		
2 LAYANAN PERKANTORAN	226,836,000		
3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	191,898,000		
4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	81,032,000		
SULAWESI TENGAH	1,475,073,000	PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	823,030,000
1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	198,840,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	87,226,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	157,572,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	42,054,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	277,338,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	652,043,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	76,172,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	223,864,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	269,480,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	82,527,000
27.	GOVERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	1,362,133,000 874,141,000 60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
28.	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	282,630,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	92,755,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	144,332,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28,766,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	265,658,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	487,992,000
1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	61,265,000		
2 LAYANAN PERKANTORAN	234,818,000		
3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	127,317,000		
4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	64,592,000		
SULAWESI TENGGARA	2,024,984,000		
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,141,399,000		
1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	198,840,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	98,815,000
		4 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	346,500,000
		5 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	148,382,000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	29,584,000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	259,278,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	883,585,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	73,374,000
		2 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	92,269,000
		3 LAYANAN PERKANTORAN	227,952,000
		4 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	489,990,000
29.	GOVERNUR GORONTALO	GORONTALO	1,454,286,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	767,600,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	60,000,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	146,940,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	99,610,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	156,182,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	45,516,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	259,352,000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	686,686,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	83,600,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	232,578,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	370,508,000
30.	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	1,553,108,000 760,411,000 60,000,000 146,940,000 97,570,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	158,072,000 33,700,000 264,129,000 792,697,000
		1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	93,732,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	239,408,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	379,252,000
		4 WORKSHOP MANFAAT FTA DI DAERAH	80,305,000
31.	GOVERNUR MALUKU	MALUKU	1,972,269,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,029,477,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	349,831,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	119,738,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	178,752,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	18,806,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	292,350,000
		1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH	120,988,000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	293,538,000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	528,266,000
32.	GOVERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1,827,317,000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1,002,858,000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70,000,000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	305,731,000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	117,146,000
		4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN	174,082,000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	39,864,000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	296,035,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI 2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	824,459,000 92,593,000 225,356,000 506,510,000
33.	GUBERNUR PAPUA	PAPUA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	2,210,854,000 1,161,347,000 70,000,000 406,025,000 123,289,000 169,678,000 47,708,000 344,647,000 1,049,507,000 104,238,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN 3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM 4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	271,955,000 369,579,000 303,735,000
34.	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH 1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH 2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI 3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA 4 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN 5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH 6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH 1 OPTIMALISASI EKSPOR DAERAH 2 LAYANAN PERKANTORAN	2,043,571,000 1,163,322,000 70,000,000 352,012,000 139,370,000 215,022,000 56,480,000 330,438,000 880,249,000 147,403,000 294,916,000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	437,930,000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

AGUS SUPARMANTO